



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Pengertian Pajak	3
2.2 <i>Self Assessment System</i>	4
2.3 Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak	5
2.3.1 Surat Tagihan Pajak	5
2.3.2 Surat Ketetapan Pajak	6
2.4 Sanksi Perpajakan	7
2.4.1 Pengertian Sanksi Administrasi	7
2.4.2 Macam-Macam Sanksi Administrasi	7
2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	11
3. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN	12
3.1 Lokasi Dan Waktu	12
3.2 Metode Pengumpulan Data	12
4. PROFIL UMUM KANWIL DJP JAWABARAT III	13
4.1 Sejarah	13
4.2 Visi dan Misi	14
4.3 Struktur Organisasi	15
4.4 Kegiatan Kanwil DJP JABAR III	17
5. PENYELESAIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGUJIAN KHILAF DI KANWIL DJP JABAR III	18
5.1. Berkas Permohonan Wajib Pajak	18
5.2. Dasar Hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitration	18
5.2.1 Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP)	19
5.2.2 Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK.03/2013	19
5.3. Penyelesaian Permohonan PT ABC	21
5.3.1 Kronologis Pengajuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT ABC	21
5.3.2 Penyampaian Surat Permohonan Ke KPP	22
5.3.3 Pengujian Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Surat Permohonan	23
5.3.4 Proses Penelitian Dan Pembuatan Laporan Penelitian	24
5.3.5 Penerbitan Surat Keputusan	33
5.4. Penyelesaian Permohonan PT XYZ	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5.4.1 Kronologis Pengajuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT XYZ	34
5.4.2 Penyampaian Surat Permohonan Ke KPP	34
5.4.3 Pengujian Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Surat Permohonan	35
5.4.4 Penelitian Dan Pembuatan Laporan Penelitian	36
5.4.5 Penerbitan Surat Keputusan	43
6. SIMPULAN DAN SARAN	43
6.1. Simpulan	43
6.2. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	46

### DAFTAR TABEL

1. Daftar sanksi administrasi berupa bunga	7
2. Daftar Sanksi Administrasi berupa denda	9
3. Daftar sanksi administrasi berupa kenaikan	10
4. Perhitungan sanksi denda berdasarkan Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan	27
5. Usulan perhitungan penghapusan sanksi administrasi PT ABC	32
6. Penghapusan sanksi administrasi pada Surat Keputusan PT ABC	33
7. Perhitungan sanksi administrasi PT XYZ menurut KPP	37
8. Usulan perhitungan penghapusan sanksi administrasi PT XYZ	42
9. Penghapusan sanksi administrasi pada Surat Keputusan PT XYZ	43

### DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017	15
2. Tabel checklist kelengkapan berkas permohonan PT ABC	22
3. Pengujian Pemenuhan Persyaratan Dan Ketentuan Permohonan PT ABC	24
4. Matrik Sengketa Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT ABC	25
5. Perhitungan sanksi administrasi STP 01234/107/18/403/19	25
6. Data PT ABC yang diperlihatkan/diberikan	26
7. Tabel <i>checklist</i> kelengkapan berkas permohonan PT XYZ	35
8. Pengujian Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan PT XYZ	36
9. Matrik Sengketa PT XYZ	37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT ABC	47
2. Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT XYZ	48
3. halaman kedua Surat Keputusan PT ABC	49
4. halaman kedua Surat Keputusan PT XYZ	50

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies